



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 529-534  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pendampingan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Pensiunan Bank BJB**

**Rahmat**

STIE Ekuitas Bandung  
Email: rahmat@ekuitas.ac.id

### **Abstrak**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah belum diterapkannya GCG secara Formal karena dalam pelaksanaannya belum ada Pedoman GCG, Hal ini akan berdampak pada perkembangan Koperasi yang baik dalam jangka panjang, kurang baiknya tata kelola pekerjaan akan berdampak negatif pada terciptanya kelangsungan Koperasi yang baik. Program ini memiliki tujuan meningkatkan sistem organisasi yang mendasari untuk pengelolaan koperasi yang menciptakan suasana koperasi yang baik, sesuai Prinsip GCG: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, dan Fairness sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang profesional, tangguh, mandiri, bertanggungjawab, Prinsip GCG yang didukung dengan pemanfaatan teknologi akan tercipta efisien dan efektifitasnya pengendalian di koperasi dan dapat meningkatkan SHU bagi anggota koperasi. Kegiatan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pelatihan dan pendampingan. Pendampingan penyusunan pedoman staffing model untuk meningkatkan efisiensi usaha pada Koperasi Pensiunan bank BJB yang beralamat di Jalan Kejaksanaan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40111 telah Selesai dilakukan. Beberapa indikator capaian program pengabdian telah diperoleh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia mitra, peningkatan produktifitas sumber daya manusia mitra, serta peningkatan efisiensi usaha mitra.  
**Kata Kunci:** Koperasi, Good Corporate Governance, Sumber Daya Manusia

### **Abstract**

Based on interviews and observations, the problem faced by partners at this time is that GCG has not been implemented formally because in its implementation there are no GCG Guidelines, this will have an impact on the development of a good cooperative in the long term, the lack of good work governance will have a negative impact on the creation of good cooperative sustainability. This program aims to improve the underlying organizational system for cooperative management that creates a good cooperative atmosphere, according to GCG Principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness so as to create professional, resilient, independent, responsible Human Resources, GCG Principles supported by the use of technology will create efficient and effective control in cooperatives and can increase SHU for cooperative members. This activity uses two approaches, namely training and mentoring approaches. Assistance in preparing staffing model guidelines to improve business efficiency at the BJB Bank Pensioner Cooperative which is located at Jalan Kejaksanaan, Lengkong District, Bandung City, West Java 40111 has been completed. Several indicators of the achievement of the service program have been obtained, starting from improving the quality of partner human resources, increasing the productivity of partner human resources, and increasing partner business efficiency.

**Keywords:** Cooperative, Good Corporate Governance, Human Resources

### **PENDAHULUAN**

Penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) sangat diperlukan oleh semua entitas bisnis. Hal ini sangat penting karena menyangkut prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* akan berdampak pada terjadinya manipulasi informasi oleh perusahaan. Perusahaan atau entitas bisnis wajib menerapkan praktik *good corporate governance*. Hal ini diperkuat dengan

Copyright : Rahmat

terbitnya pedoman umum *good corporate governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menerapkan praktik *good corporate governance*.

Koperasi merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang ekonomi yang selama ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, karena dalam pengaplikasian kegiatan selalu berusaha mengedepankan kepentingan anggotanya berdasarkan kesejahteraan bersama. Koperasi telah ditetapkan sebagai badan usaha berdasarkan UU no 25 tahun 1992.

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa kumpulan anggota perseorangan yang membentuk suatu kelompok dalam rangka mengadakan kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam pada awal pembentukannya. Dimana, dalam suatu kelompok diadakan kegiatan pengumpulan modal yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, pada realitanya dalam pengaplikasian kegiatan ekonomi organisasi koperasi, terdapat kendala yang harus dihadapi, yakni tidak semua anggota koperasi dapat melakukan pengolahan modal yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya hal itu, maka diperlukan adanya peran pengurus koperasi yang berkompeten, teliti dan loyal untuk menangani secara khusus dalam membantu anggota mengelola dan mengembangkan koperasi.

Koperasi adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, pertumbuhan koperasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu agar menjadi bagian substantif dan Integralistik dalam perkenomian nasional. Agar tetap bangkit, dalam tataran operasional koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut dibutuhkan berbagai teori yang kuat, dan manajemen serta organisasi yang tangguh.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan parastakeholders lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran-sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja. *Good corporate governance* (GCG), Stijn Claessens (2000) membagi pengertian pengelolaan perusahaan menjadi dua kategori yaitu serangkaian pola tindak perusahaan yang punya tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum (regulasi dan norma) yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi tentang penyusunan sistem penerapan *Good Corporate Governance* pada koperasi Pensiunan Bank bjb dalam rangka untuk memberikan informasi yang valid dan akurat kepada stakeholder mengenai profil implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi.

## **METODE**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan Focus Group Discussion (FGD) bersama mitra, solusi yang disepakati untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* dengan metode pendekatan teori dan praktek. Pelaksanaan program dilakukan di kantor mitra yang beralamat di Jalan Kejaksaan No.10 di Kelurahan, Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40111. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 kali pertemuan dalam 2 bulan yaitu pertemuan pertama kepada seluruh pegawai koperasi (kegiatan pendidikan dan pelatihan), pertemuan kedua kepada dua kepada Pengurus yaitu Pengawas dan Ketua Koperasi serta pertemuan ketiga kepada seluruh Pengurus dan pegawai Koperasi dengan kegiatan mensosialisasikan Pedoman GCG yang telah dibuat.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengabdian antara lain tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan serta tahap monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan

rencana dan jadwal kegiatan, sosialisai jadwal kegiatan, pengumpulan alat dan bahan, pembuatan modul pendidikan, serta alokasi tim yang terlibat dalam pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan a) sosialisai pra penyusunan pedoman GCG, dilakukan pada awal bulan februari 2023 kepada seluruh pegawai Koperasi untuk memberikan Pemahaman yang baik tentang GCG dan kenapa itu diperlukan, b) Penyusunan pedoman GCG, dilaksanakan selama bulan Maret – Juli 2023 dengan melibatkan pegawai perusahaan mitra, dan c) sosialisai kepada seluruh pegawai mengenai pedoman GCG, dilakukan dalam tiga kali pertemuan di bulan Juli 2023. Pada tahap implementasi pedoman GCG dilakukan pendampingan, untuk memastikan bahwa pedoman dilaksanakan dengan baik, yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2023 dimulai dengan melakukan work load analysis menggunakan time motion study terhadap seluruh pegawai koperasi, dan kemudian ditentukan standar penyelesaian setiap pekerjaan dengan mempertimbangkan rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan serta koreksi waktu yang rasional. Pada tahap evaluasi dilakukan observasi untuk memastikan dampak dari implementasi staffing model dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini diharapkan dapat Selesai di bulan Agustus 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan kepada koperasi mulai awal bulan Februari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh pegawai koperasi yang berjumlah 10 orang. Kegiatan ini juga dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa Prodi D-3 Akuntansi.

### **1) Tahap Persiapan**

Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu 1) awareness building, 2) Good Corporate Governance assessment, 3) Good Corporate Governance manual building. Awareness building merupakan langkah sosialisai awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independent dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

*Good Corporate Governance* assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *Good Corporate Governance* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan good corporate governance secara efektif. Dengan kata lain *Good Corporate Governance* assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Good Corporate Governance manual building adalah langkah berikut setelah assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate Governance dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- a. kebijakan Good Corporate Governance perusahaan,
- b. pedoman Good Corporate Governance bagi organ-organ perusahaan,
- c. pedoman perilaku,
- d. audit committee charter,
- e. kebijakan disklosur dan transparansi,
- f. kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan
- g. roadmap implementasi.

### **2) Tahap Implementasi**

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance manual*, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu (1). Sosialisasi, (2) implementasi, (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada koperasi berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Pengurus yang ditunjuk. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasarkan roadmap yang disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan Pengurus koperasi. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi *Good Corporate Governance*. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan koperasi. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

### 3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan skoring. Evaluasi dalam bentuk assesment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Dalam hal membangun *Good Corporate Governance*, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa *Good Corporate Governance*, maka diperlukan langkah-langkah berikut :

- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas,
- b. mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*chek and balance*),
- c. membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan,
- d. membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan,
- e. membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (fair) dan setara diantara para pemegang saham, dan
- f. membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- a. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi

serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

- b. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Pengurus dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
- c. Nilai perusahaan koperasi akan meningkat dimata stakeholder sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan koperasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada koperasi akan dapat memudahkan untuk mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan koperasi terutama untuk tujuan ekspansi
- d. Dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholders yang seharusnya dikelola dengan baik, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap koperasi
- e. Dengan baiknya pelaksanaan GCG, maka kepercayaan stakeholders kepada akan meningkat.
- f. Penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak – pihak yang terkait dengan koperasi agar memperhatikan tanggung jawabnya mensejahterakan anggota. Kesejahteraan anggota koperasi menjadi hal utama yang semestinya diperhatikan pihak manajemen.

Untuk dapat menjalankan fungsi serta perannya yang begitu penting untuk perekonomian maka koperasi harus dapat dikelola secara baik agar dapat meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Oleh karena itu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gencar mensosialisasikan tentang GCG pada koperasi kepada masyarakat agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun

## **SIMPULAN**

Pendampingan penyusunan pedoman staffing model untuk meningkatkan efisiensi usaha pada Koperasi Pensiunan bank BJB yang beralamat di Jalan Kejaksaan Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111 telah Selesai dilakukan. Beberapa indikator capaian program pengabdian telah diperoleh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia mitra, peningkatan produktifitas sumber daya manusia mitra, serta peningkatan efisiensi usaha mitra.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi  
Claessens, Stijn, Simeon Djankov, dan Larry H.P. Lang. 2000. "The separation of ownership and control in East Asian Corporations".  
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum GCG Indonesia, Jakarta.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Retrieved 4 6, 2017, from Portal Mahkamah Konstitusi: <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1f32ffaa83555e001038d1e0cda7b281849acef2d.pdf>

Kaihatu, T. S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan

Kewirausahaan, Vol. 8, No.1 : 1-9, Maret.

- Arifin. (2005). "Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)". Sidang Pengukuhan Guru Besar Undip, E-Prints.
- Boediono, Gideon. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- Lastanti. 2004. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Iskandar, I. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 113-131
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>
- C. Laudon, Kenneth & P. Laudon, Jane. 2005. Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital. Edisi 8. Andi Offset. Yogyakarta
- Hany Setyorini, Mas'ud Effendi, Imam Santoso. 2016. Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks SWOT dan QSPM (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta Malang). Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri. Vol 5, No 1.
- Ahmadjayadi, C. et al., 2008. Kerangka Acuan dan Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintahan. April ed. Jakarta: Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Arifin. 2005. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekosinia
- Puspitasari, D.S., & Ludigdo, U. 2013. *Good Governance of Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur*. Universitas Brawijaya.
- Tadikapurry, Violetta Jingga. 2011. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank X, Tbk. Kanwil X. Universitas Hasanuddin
- Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) pada BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) pada BUMN.